

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2017-2021**

**JOANA L. SARAGIH¹
RUMINTA LUMBAN GAOL²**

^{1,2} Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
saragihjoana@gmail.com¹, rumintalumbangaol843@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of economic growth, local revenue and general allocation funds on the allocation of capital expenditures in Humbang Hasundutan district in 2017-2021. The data collection technique used is documentation technique. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis technique, namely to determine the relationship between the independent variable and the dependent variable.

The results of this study partially show that economic growth has no significant positive effect on capital expenditures. This is indicated by the value of t arithmetic $< t$ table where $0.512 < 1.687$ with a significance level of $0.611 > 0.05$, local revenue has a significant positive effect on capital expenditure. This is indicated by the value of t count $0.949 > t$ table 1.687 with a significant value of $0.048 < 0.05$, general allocation funds have an insignificant negative effect on capital expenditure. This is indicated by t count $-0.545 < t$ table 1.687 with a significant value of $0.589 > 0.05$. Simultaneously, economic growth, local revenue and general allocation funds have no significant effect on capital expenditure, this is indicated by a significant value of $0.778 > 0.05$ and F count $0.366 < F$ table 2.852 .

Keywords: *Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund and Capital Expenditure.*

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan dari kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang menunjukkan perubahan yang bersifat

kuantitatif. salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan disuatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. Menurut Halim dalam Putri Retno Aryani (2017:3) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan bertambahnya pendapatan asli daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. PAD diukur dengan nilai nominal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kuncoro dalam Mazan Sulaiman (2020 :307) DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota yang bertujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan berdasarkan prinsip tertentu dimana daerah miskin atau terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari dengan objek dan periode yang berbeda yang namun variabel yang digunakan adalah sama.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari 10 kecamatan. dalam beberapa tahun berjalan proporsi dana alokasi umum (DAU) terhadap daerah masih sangat tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal pemerintahan Humbang Hasundutan tahun periode 2017-2021.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Kecamatan	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal
Kecamatan Baktiraja	2017	0,01	Rp. 18.970.685.732
	2018	0,13	Rp. 18.778.134.576
	2019	0,13	Rp. 18.345.673.892
	2020	0,14	Rp. 15.445.056.763
	2021	0,14	Rp. 15.127.255.689
Kecamatan Dolok Sanggul	2017	0,22	Rp. 16.050.432.567
	2018	0,22	Rp. 17.556.861.322
	2019	0,21	Rp. 18.790.670.544
	2020	0,21	Rp. 18.897.679.986
	2021	0,21	Rp. 18.240.871.345

Sumber : Kabupaten Humbang Hasundutan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian keempat di ayat ke 2 di sebutkan bahwa bertambahnya infrastruktur dan perbaikan

oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, bila pertumbuhan ekonomi baik, maka pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana.

Penelitian yang di lakukan Oleh Maslikah (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel 1 di atas tahun 2017-2021 pada kecamatan Baktiraja pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sedangkan belanja modal mengalami penurunan, pada kecamatan Dolok Sanggul tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sedangkan belanja modal mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan teori, dan berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Kecamatan	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Belanja Modal (Rp)
Kecamatan Baktiraja	2017	Rp. 5.579.230.532	Rp. 18.970.685.732
	2018	Rp. 6.977.855.867	Rp. 18.778.134.576
	2019	Rp. 6.990.728.084	Rp. 18.345.673.892
	2020	Rp. 7.559.448.138	Rp. 15.445.056.763
	2021	Rp. 8.527.432.226	Rp. 15.127.255.689
Kecamatan Tarabintang	2017	Rp. 5.941.752.033	Rp. 14.280.035.674
	2018	Rp. 5.751.749.042	Rp. 15.487.412.856
	2019	Rp. 5.551.739.052	Rp. 17.654.089.919
	2020	Rp. 5.190.123.250	Rp. 14.968.542.314
	2021	Rp. 4.975.260.342	Rp. 16.942.543.127

Sumber : Kabupaten Humbang Hasundutan

Abdul Halim (2001) yang mengatakan bahwa daerah yang di tunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat yang akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah di harapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah.

Berdasarkan tabel 2 di atas tahun 2017-2021 pada kecamatan Baktiraja pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sedangkan belanja modal mengalami penurunan, pada kecamatan Tarabintang tahun 2017-2021 pendapatan asli daerah mengalami penurunan

sedangkan belanja modal mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan peningkatan pendapatan asli daerah memberi efek signifikan terhadap belanja modal

Tabel 3 Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Kecamatan	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Belanja Modal (Rp)
Kecamatan Baktiraja	2017	Rp. 57.898.820.458	Rp. 18.970.685.732
	2018	Rp. 59.467.799.755	Rp. 18.778.134.576
	2019	Rp. 64.285.356.894	Rp. 18.345.673.892
	2020	Rp. 66.345.890.145	Rp. 15.445.056.763
	2021	Rp. 70.786.235.678	Rp. 15.127.255.689
Kecamatan Pollung	2017	Rp. 60.918.478.700	Rp. 15.982.670.543
	2018	Rp. 58.028.275.400	Rp. 16.890.084.755
	2019	Rp. 57.965.230.678	Rp. 17.825.649.028
	2020	Rp. 57.698.772.348	Rp. 16.939.547.195
	2021	Rp. 57.145.246.789	Rp. 17.997.098.762

Sumber : Kabupaten Humbang Hasundutan

Abdul Halim (2004) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Hal ini di sebabkan karena adanya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Berdasarkan tabel 3 di atas tahun 2017-2021 pada kecamatan Baktiraja dana alokasi umum mengalami peningkatan sedangkan belanja modal mengalami penurunan, pada kecamatan Pollung tahun 2017-2021 dana alokasi umum mengalami penurunan sedangkan belanja modal mengalami peningkatan. Hal ini berbeda dengan peneliti terdahulu yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh negative terhadap pengalokasian belanja modal.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi sering kali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan

pada distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu Maryati dan Endrawati dalam Muhammad Reza (2018:28).

Pendapatan Asli Daerah

Definisi pendapatan asli daerah sesuai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. Menurut Abdul Halim (2007:96) Pendapatan asli daerah adalah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sholikin Bratakusuma dalam Niputu Gina Sukma (2018) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berhasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi

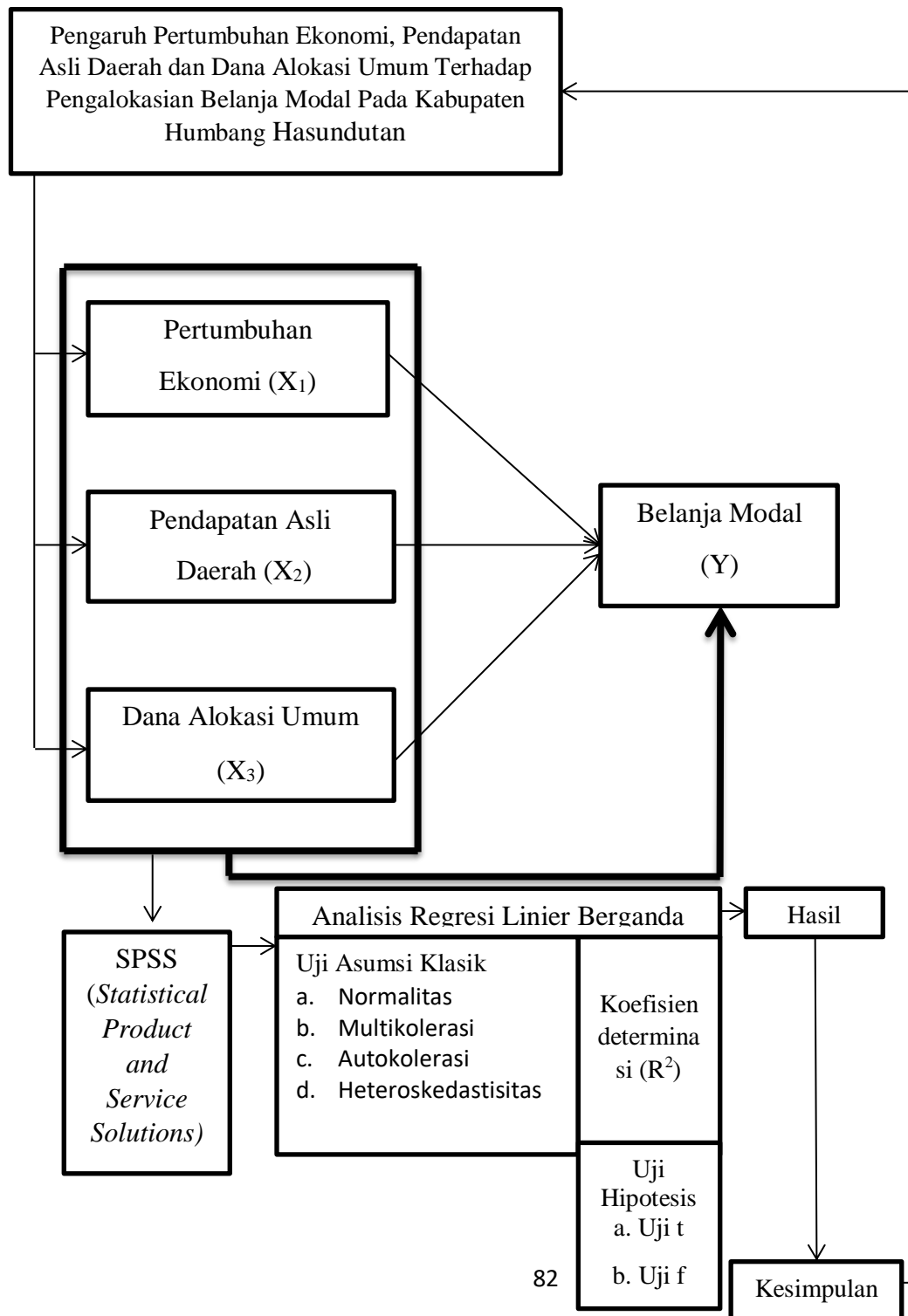
pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimalnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah, sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan terutama dana alokasi umum.

Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kerangka Berfikir



Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada kabupaten Humbang Hasundutan.
- H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada kabupaten Humbang Hasundutan.
- H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada kabupaten Humbang Hasundutan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2017-2021 yang terdiri dari 10 kecamatan di kabupaten Humbang Hasundutan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dari anggota populasi yang di pandang mewakili populasi. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2017- 2021, yaitu sebanyak 50 (10 kecamatan x 5 tahun) teknik penentuan sampel adalah *Convinience Sampling* yaitu pengambilan Sampel di permudah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda ini biasanya yang digunakan untuk

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif dan negatif.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Teknik Analisis Data

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.864	1.961		5.539	.000		
Lg10_PE	.007	.014	.084	.512	.611	.987	1.013
Lg10_PAD	.062	.066	.202	.949	.048	.577	1.732
Lg10_DAU	-.117	.214	-.116	-.545	.589	.581	1.722

a. Dependent Variable: Lg10_BM

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,864 + 0,007 X_1 + 0,062 X_2 + -0,117 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai konstan artinya 10,864 jika diasumsikan nilai dari variabel X_1 (Pertumbuhan Ekonomi), X_2 (Pendapatan Asli Daerah) dan X_3 (Dana Alokasi Umum) adalah konstan atau sama dengan 0, maka nilai Variabel Y (Belanja Modal) adalah 10,864
- Nilai Koefisien pertumbuhan ekonomi adalah 0,007 artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% akan menurunkan belanja modal sebesar 0,007 atau 0,7%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
- Nilai koefisien Pendapatan asli daerah adalah 0,062, artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah tetap 1% akan menurunkan belanja modal sebesar 0,062 atau sebesar 6,2%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.

- d. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum adalah 0,117 artinya setiap kenaikan dana alokasi umum 1% maka akan menurunkan belanja modal sebesar 0,117 atau 11,7%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.

2. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lg10_PE	42	.01	.31	.7454	.39715
Lg10_PAD	42	9.48	9.95	9.7422	.11198
Lg10_DAU	42	10.73	10.86	10.7915	.03419
Lg10_BM	42	10.15	10.28	10.2156	.03443
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Olahan Output SPSS 22(Data Olah)

1. Belanja Modal (Y) memiliki rata-rata sebesar 10,2156 dan nilai standart deviation 0,03443. Nilai maksimum sebesar 10,28 dan nilai minimum sebesar 10,15.
2. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) memiliki rata-rata sebesar 0,7454 dan nilai standart deviation sebesar 0,39715. Nilai maksimum sebesar 0,31 dan nilai minimum sebesar 0,01.
3. Pendapatan asli daerah (X_2) memiliki rata-rata sebesar 0,97422 dan nilai standart deviation 0,11198. Nilai maksimum sebesar 9,95 dan nilai minimum sebesar 9,48.
4. Dana alokasi umum memiliki rata-rata sebesar 10,7915 dan nilai standart deviation 0,03419. Nilai maksimum sebesar 10,86 dan nilai minimum sebesar 10,73.

3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	Std. Deviation	.03393509
Most Extreme Absolute		.122
Differences Positive		.070
Negative		-.122
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel di atas terlihat bahwa besarnya signifikan lebih dari 5% (0,05) yaitu signifikannya sebesar 0,133 (13,3%) maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

4. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

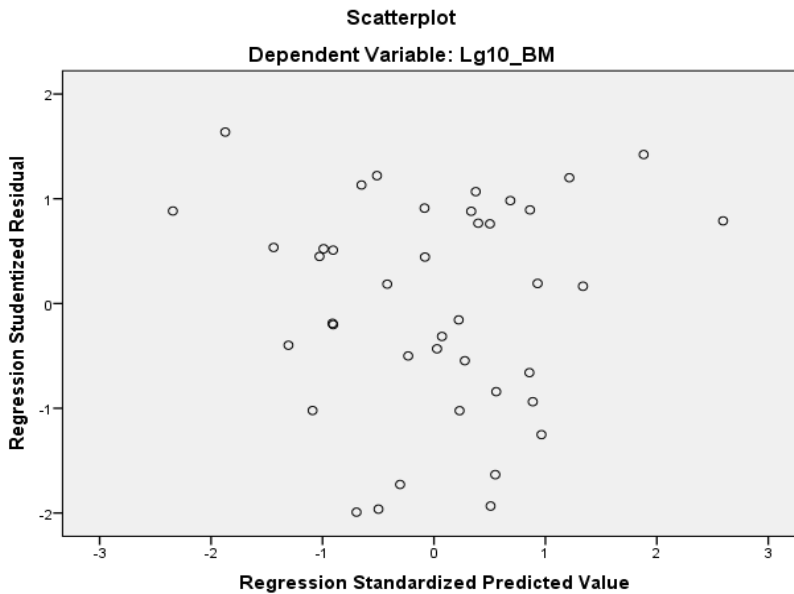
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.864	1.961		5.539	.000		
Lg10_PE	.007	.014	.084	.512	.611	.987	1.013
Lg10_PAD	.062	.066	.202	.949	.048	.577	1.732
Lg10_DAU	-.117	.214	-.116	-.545	.589	.581	1.722

a. Dependent Variable: Lg10_BM

Sumber :Hasil Output SPSS 22 (data olah)

Berdasarkan tabel diatas ,terlihat bahwa nilai tolerance >0,10 dan VIF <10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tersebut tidak terdapat hubungan multikolieritas. Dari hasil uji ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang dipakai dalam penelitian ini lolos uji gejala multikolinearitas.

5. Uji Heteroskedastisitas



Dari Scatterplot dapat diketahui bahwa titik- titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka pada model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas . Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

6. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.687 ^a	.472	.442	.86893	1.674

a. Predictors: (Constant), Lg10_DAU, Lg10_PE, Lg10_PAD

b. Dependent Variable: Lg10_BM

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (data olah)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.674. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi dimana nilai Durbin-Watson sebesar 1.674, yaitu berada di antara nilai -2 dengan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$) (Sunyoto, 2018:92).

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	.687 ^a	.472	.442	.86893	1.674
---	-------------------	------	------	--------	-------

a. Predictors: (Constant), Lg10_DAU, Lg10_PE, Lg10_PAD

b. Dependent Variable: Lg10_BM

Sumber : Hasil output spss 24(data diloah)

Berdasarkan tabel diatas, besarnya R Square 0,472 hal ini berarti 47,2% variasi belanja modal dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi,pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

8. Uji t (Uji signifikan Parsial)

9. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.864	1.961		5.539	.000
Lg10_PE	.007	.014	.084	.512	.611
Lg10_PAD	.062	.066	.202	.949	.048
Lg10_DAU	-.117	.214	-.116	-.545	.589

a. Dependent Variable: Lg10_BM

Sumber: Hasiloutut spss 22 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki t_{hitung} sebesar $0,512 <$ dari t_{tabel} yaitu $1,687$ ($0,512 < 1,687$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,611$ lebih besar dari tingkat keyakinan $0,05$ ($0,611 > 0,05$) maka H_0 diterima, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.
2. Variabel pendapatan asli daerah memiliki t_{hitung} sebesar $0,949 <$ dari t_{tabel} yaitu $1,687$ ($0,949 < 1,687$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,048$ lebih kecil dari tingkat keyakinan $0,05$

(0,048 < 0,05) maka H_0 tolak, yang berarti bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

3. Variabel dana alokasi umum memiliki t_{hitung} sebesar $-0,545 <$ dari t_{tabel} yaitu 1,687 ($-0,545 < 1,687$) dengan tingkat signifikan sebesar 0,589 dengan tingkat keyakinan 0,05 ($0,589 > 0,05$) maka H_0 diterima, yang berarti bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

8. Uji F (Uji Signifikan Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	3	.002	.366	.778 ^b
	Residual	.046	38	.001		
	Total	.049	41			

a. Dependent Variable: Lg10_BM

b. Predictors: (Constant), Lg10_DAU, Lg10_PE, Lg10_PAD

Berdasarkan hasil Uji F diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari model penelitian ini adalah sebesar $0,778 > 0,05$ dan $F_{hitung} 0,366 < F_{tabel} 2,852$ maka H_0 diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten Humbang Hasundutan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $0,512 < 1,687$ dengan tingkat signifikansi $0,611 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan Nilai $t_{hitung} 0,949 > t_{tabel} 1,687$ dengan nilai signifikan $0,048 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
3. Dana Alokasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan . Nilai $t_{hitung} -0,545 < t_{tabel} 1,687$ dengan nilai signifikan sebesar $0,589 > 0,05$. maka Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah negatif tidak signifikan.
4. Nilai koefisien korelasi (R Square) sebesar 0,472 atau 47,2% artinya variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu (belanja modal) sebesar 47,2 % sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Belanja Modal maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengolah Dana Alokasi Umum dengan baik, serta terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dilihat dari nilai Pertumbuhan Ekonomi agar tercipta keseimbangan yang baik antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal, karena naiknya Pertumbuhan Ekonomi yang baik akan diikuti dengan kenaikan Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Retno Putri. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhamdiyah.
- Boediono, 2013. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapartan Asli Daerah dan DanaAlokasi Umum terhadap Belanja Modal. *E-Journal SI Ak Universitas pendidikan Ganesha*. Vol 2,No 1 Kab, Buleleng.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X* di Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Devas,dkk.2016. *Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Riset Bisnis dan Management keuangan*. Vol 6, No 1 Kota Sorong
- Ghozali, Imam dan Fuad, 2005. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Tiga, Undip, Semarang.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Volume 2 Nomor 1 hal 53-64.
- Halim, Abdul. 2002. *Metode Penelitian.Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta : Salemba Empat.
- Haloho, Horia. 2014. Pengaruh Penfdapartan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Simalungun: Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
- Maslikah, Siti Haniatun. 2004. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. (Study Kasus Pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah)*. Jawa Tengah: Program Study Akuntansi Dian Nusantara. Semarang:
- Mayasari Dkk. (2014) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurzen, Miardi.2016.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Online)* Jilid 5,No. 4 di Akses 18 Maret.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.

Petro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Jawa Tengah: Universitas Diponegoro.

Purwanto, Fiona Puspita Devi. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Jawa Tengah: Universitas Yogyakarta.

Reza, Muhammad. 2018. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.

Sagala, R. and Marbun, G., 2022. Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Bpjs Mandiri Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Bina Kasih Medan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, pp.462-487.

Sedana, Panji Ida Bagus. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Unud (Online)* Jilid 7, No 2 di Akses 18 Maret.

Sugiyono, (2009). Metode Penelitian Bisnis. *Jurnal Inovasi Penelitian* . Vol 1, No 10

Sukma, Niputu Gina. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Unud (Online)* Jilid 7, No 2 di Akses 18 Maret.

Sulaiman, Mazan. 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan*. No 4.

Sumarni, Saptaningsi. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta*:

Susanti, Dkk 2000. *Indikator-indikator Makro Ekonomi*. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Tondang, I.S.U. and Marbun, G., 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, pp.115-128.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Dana Yang bersumber dari APBN.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber Pendanaan Daerah,.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.

Widianto, Andri, Dkk. 2003. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*